

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No 54 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. FIDA HURASANI, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	1
1	BAB I PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
2	BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD	7
	<i>Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020 danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	<i>Tabel 2Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKabupaten Kutai Kartanegar</i>	17
3	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1	Program dan Kegiatan	18
	<i>Tabel 5Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	20
4	BAB IV PENUTUP	34



1.1. LATAR BELAKANG

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja atau Renja SATPOL PP Tahun 2020 merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016– 2021;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada satuan polisi pamong praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP di tahun 2020, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja SATPOL PP pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada umumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nonmor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, RENSTA-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Meguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2019, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020 danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan. Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Tahun 2020, pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA), Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 9 program dan 39 kegiatan, sedangkan pada Dokumen RENSTRA 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 9 Program dan 41 kegiatan. Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran yang ditetapkan. Hal ini juga menyebabkan capaian kinerja yang termuat di dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dicapai dengan semestinya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja SATPOL PP sampai triwulan 2 untuk tahun anggaran 2020 sebesar 26,71% dan capaian realisasi keuangan sebesar 28,60%.

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 7.486.805.076,96. capaian fisik 23,92%, dengan realisasi keuangan Rp 3.019.103.543.
2. Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 862.160.600. capaian fisik 30,13% dengan realisasi sebesar Rp 130.233.500.
3. Anggaran Program Peningkatan Disiplin Pegawai terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran Rp 961.646.000 masih dalam proses pengadaan.
4. Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 644.550.000 dan realisasi sebesar Rp 146.939.300 atau 22,81%.
5. Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 249.000.000 dan realisasi sebesar Rp 19.997.000 atau 8%.
6. Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 3 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 275.000.000 dan realisasi sebesar Rp 28.750.000 atau 10,45%.
7. Anggaran Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan terdiri dari 1 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4.757.000.000 dan realisasi sebesar Rp 4.434.572.450 atau 93,21%.
8. Anggaran Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah keamanan terdiri dari 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 493.591.000 dan realisasi sebesar Rp 38.980.000 atau 7,9%.

Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dengan pencapaian RENSTRA SKPD.

Tabel 1														
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2020 dan														
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)														
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA														
Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan		Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2020)				Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
						K	Anggaran	Target RENJA-PD tahun (2020)	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan		Realisasi Target Renstra (%)	
1	2		3	4		5		6	7		8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%				837,364,566						
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12500	exemplar	3700	lembar	13,600,000	2500	400	lembar	16%		lembar 33%
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20	rekening	6	rekening	46,296,316	4	4	rekening	100%		rekening 50%

		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	375	unit	150	unit	67,557,000	79	2	unit	3%		152	unit	41%
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	60	bulan (125 orang, 175 orang)	18	bulan	513,262,000	12	3	bulan	25%		21	bulan	35%
		5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	725	unit	94	unit	56,369,900	145	2	unit	1%		96	unit	13%
		6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	335	jenis	38	Jenis	121,941,350	67	67	Jenis	100%		105	Jenis	31%
		7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	34250	exemplar	308	exemplar	18,338,000	11250	616	exemplar	5%		924	exemplar	3%

8	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	76	jenis	13	jenis	14,483,300	21	16	jenis	76%		29	jenis	38%
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	34370	porsi	7656	porsi	204,176,240	8852	180	porsi	2%		7836	porsi	23%
10	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	1608	orang/ 60 bulan	544	orang	17,534,306,000	270	268	orang	99%		812	orang	50%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	35	unit	6	paket	61,921,750	7	3	paket	43%		9	paket	26%

	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	6133	orang/hari	415	O/H	695,419,947	2844	85	O/H	3%		500	O/H	8%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	100%				32,655,850								
	14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	180	unit	0	unit		76		unit	0%		0	unit	0%
	15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4	paket	3	paket	32,655,850	1		paket	0%		3	paket	75%
	16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	399	unit	225	unit	765,252,851	79	34	unit	43%		259	unit	65%
	17	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	883	unit	0	unit		883	883	unit	100%		883	unit	100%

			Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah						-							
			Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Dokumen	6.00	dokumen			2		dokumen	0%		0	dokumen	0%
			Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada	1500	laporan kejadian dan pelanggaran			500		laporan kejadian dan pelanggaran	0%		0	laporan kejadian dan pelanggaran	0%
			Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial	Jumlah Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial	1501	laporan kejadian dan pelanggaran			2		perda	0%		0	perda	0%
			Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan	Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	9	perda	9	perda	250,000,000	3	1	perda	33%	10	perda	111%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU). Indikator Kinerja Kunci (IKU) SATPOL PP dan target capaiannya tertuang dalam RENSTRA 2016-2021 yaitu :

No	IKU	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
		2016	2017	2018	2020	2020	2021
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	BB	A
2	Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP.	-	-	-	70	76	80
3	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	40%	60%	80%

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2020 sampa triwulan 2 untuk masing –masing indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator penilaian kinerja OPD yang biasa disebut LkjIP. Untuk tahun 2018, belum dilaksanakan penilaian LkjIP oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasil penilaian untyuk SATPOL PP belum dapat disajikan.
2. Indikator Indeks kepuasan pelayanan terhadap satpol PP. merupakan indikator yang diperoleh dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja SATPOL PP. Sampai tahun 2020, SATPOL PP belum pernah melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
3. Indikator Persentase Penegakan PERDA merupakan indikator yang diperoleh dengan cara mengukur perbandingan jumlah laporan kejadianyang diselesaikan dibagi jumlah laporan kejadian yang dilaporkan dikali 100%.Tahun 2020.

Dalam tataran pengambilan kebijakan (IKK/Indikator Kinerja Kunci), SATPOL PP termasuk kedalam aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah dimana capaiannya difokuskan pada 2 hal yaitu Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dan Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk.

Capaian IKK pada tahun 2020 untuk masing –masing indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN* merupakan indikator yang diperoleh dengan cara mengukur jumlah perda pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Capaian IKK SATPOL PP adalah 100% dimana Perda pelaksanaan sebanyak 12 dan perda yang seharusnya sebanyak 12.
2. Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk merupakan indikator yang diperoleh dengan cara menghitung jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2016 dibagi dengan

10.000 jumlah penduduk dikali 100%. Rasio capaian IKK SATPOL PP adalah 1.71% dimana jumlah personil SATPOL PP adalah 171 orang.

Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), SATPOL PP sudah tidak melaksanakan karena amanat SPM untuk SATPOL PP yang terdapat pada Permendagri nomor 69 Tahun 2012 dimana terdapat 3 capaian yaitu Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota, Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota sudah berakhir pada tahun 2015.

Dalam pelaksanaan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan Penindakan Preventive non yustisial (Surat Teguran). Dibiidang Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat ruang lingkupnya meliputi Pengamanan, tempat, aset daerah, Pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, Terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pejabat negara, daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak daerah, sumber PAD, serta objek vital daerah.

Tabel II.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja												
Kutai Kartanegara												
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
				2017	2018	2019	2020	2021		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11	12	13
1	indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.			B	B	B	BB	BB	B	BB	BB	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat					70	76	80		76	80	
3			Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN						100%			
5	Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	40%	60%	80%	100%	60%	80%	
7			Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk						6.5			



3.2. Tujuan dan sasaran renja satuan polisi pamong praja

Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP.
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah.

3.1. Program dan Kegiatan

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, **“Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat”**, dengan Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dan sasaran Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha **untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana**. Berangkat dari sasaran Gerbang Raja II tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengemban tugas Keamanan dan Ketertiban Umum menetapkan program dan kegiatan.

Untuk tahun 2020, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, maka SATPOL PP merencanakan 8 program dan 42 kegiatan. Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap penegakan perda, maka kegiatan yang berhubungan dengan msyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertibanjalur hijau serta jalan utama dari PKL di kecamatan tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan perda seperti perda KTP, Perda Miras dan Perda Prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban Perijinan baik itu IMB

maupun izin usaha yang terfokus di kecamatan Tenggara, Loa Kulu, Tenggara Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. SATPOL PP juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3). Disamping itu, SATPOL PP juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran renja satuan polisi pamong praja

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.
2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Satpol PP.
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah.

Tabel 5																
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020																
dan Prakiraan Maju Tahun 2021																
Kabupaten Kutai Kartanegara																

3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	62 Unit	54,500,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	79 Unit	54,500,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	79 Unit	54,500,000.00		79 Unit	54,500,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 bulan (25 orang, 175 orang)	287,151,620					Kantor SATPOL PP	0	0	0.00			
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor SATPOL PP	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki/dipelihara	145 unit (65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)	25,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki/dipelihara	145 unit (65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)	25,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki/dipelihara	145 unit (65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)	25,000,000.00		145 unit (65 HT,12 AC,20 Komputer,15 Printer, Alat Fitness)	25,000,000

6	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor SATPOL PP	Jumlah alat tulis kantor	67 Jenis (3343- Pack,rim,roll,Block,Buku,Buah,Lusin,Kotak,Pad,Botol,Unit)	52,500,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah alat tulis kantor	67 Jenis (3343- Pack,rim,roll,Block,Buku,Buah,Lusin,Kotak,Pad,Botol,Unit)	147,398,500	Kantor SATPOL PP	Jumlah alat tulis kantor	67 Jenis (3343- Pack,rim,roll,Block,Buku,Buah,Lusin,Kotak,Pad,Botol,Unit)	147,398,500.00				147,398,500
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor SATPOL PP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 Jenis	24,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 Jenis	24,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7 Jenis	24,000,000.00			7 Jenis	24,000,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor SATPOL PP	1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	11250 exemplar	12,240,000	Kantor SATPOL PP	1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	11250 exemplar	12,240,000	Kantor SATPOL PP	1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	11250 exemplar	12,240,000.00			11250 exemplar	12,240,000

9	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor SATPOL PP	Tersedian ya bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersiha n dan bahan pembersih	21 jenis	8,200,000	Kantor SATPOL PP	Tersedian a bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis	8,200,000	Kantor SATPOL PP	Tersedian a bahan logistik kantor , berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis	13,200,000.00		5,000,000	21 jenis	13,200,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Satpol PP dan Lokasi Lainnya	Jumlah Makanan dan Minuman	8852 porsi/12 Bulan	52,800,000	Kantor Satpol PP dan Lokasi Lainnya	Jumlah Makanan dan Minuman	8852 porsi/12 Bulan	52,800,000	Kantor Satpol PP dan Lokasi Lainnya	Jumlah Makanan dan Minuman	10518 porsi/12 Bulan	102,800,000.00		50,000,000	10518 porsi/12 Bulan	102,800,000
11	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Dalam dan Luar Kabupate n Kutai Kartaneg ara	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	2844 O/H	166,000,000	Dalam dan Luar Kabupate n Kutai Kartaneg ara	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	2844 O/H	166,000,000	Dalam dan Luar Kabupate n Kutai Kartaneg ara	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	2898 O/H	206,000,000.00		40,000,000	2898 O/H	206,000,000
12	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Kantor SATPOL PP	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	270 orang/ 12 bulan	6,067,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	270 orang/ 12 bulan	6,699,665,577	Kantor SATPOL PP	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	270 orang/ 12 bulan	6,668,255,576.96	-31,410,000		270 orang/ 12 bulan	6,668,255,577

13	Penataan Arsip Perangkat Daerah					Kantor SATPOL PP	jumlah arsip yang tertata	1000 arsip	250,000,000	Kantor SATPOL PP	jumlah arsip yang tertata	1000 arsip	250,000,000.00			1000 arsip	250,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	504,000,000			100%	505,703,600			100%	1,284,442,600.00	-	778,739,000		1,284,442,600
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	20,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	20,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Paket	220,000,000.00		200,000,000	1 Paket	220,000,000
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	62 unit	303,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	62 unit	303,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	62 unit	378,750,000.00		75,750,000	62 unit	378,750,000
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	104 Unit (	181,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	104 Unit (	182,703,600	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	134 Unit	685,692,600.00		502,989,000	134 Unit	685,692,600

17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					Kantor SATPOL PP	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	250,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah barang/unit yang diinventarisasi	2 unit	516,600,000.00		266,600,000	2 unit	516,600,000
18	Pengadaan meubelair	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan mebeleur	10 Jenis	106,457,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan mebeleur	10 Jenis	106,457,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengadaan mebeleur	10 Jenis	306,457,000.00		200,000,000	10 Jenis	306,457,000
																	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				3	50,000,000				45,000,000				45,000,000.00		-		45,000,000
19	Penyusunan SOP Pembinaan pegawai Satpol PP	Kantor SATPOL PP	jumlah dokumen	1 dokumen	50,000,000	Kantor SATPOL PP	jumlah dokumen	1 dokumen	45,000,000	Kantor SATPOL PP	jumlah dokumen	1 dokumen	45,000,000.00			1 dokumen	45,000,000

20	Pengeraan dan kesiapsiagaan Anggota Satpol PP	Kantor SATPOL PP	jumlah upacara/apel	24 upacara/apel	300,000,000	Kantor SATPOL PP	jumlah upacara/apel	24 upacara/apel	619,090,000	Kantor SATPOL PP	jumlah upacara/apel	24 upacara/apel	709,117,050.00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				100%	110,000,000			100%	110,000,000			100%	0.00	(110,000,000)
21	Fasilitasi Tim BEKIAS	Kab KUKAR	Jumlah orang	15 Orang	110,000,000	Kab KUKAR	Jumlah orang	15 Orang	110,000,000	Kab KUKAR	Jumlah orang	15 Orang	0	(110,000,000)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	210,000,000			100%	133,300,000			100%	279,905,000.00	-
22	pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah pengawasan dan pengendalian	15 kegiatan SATPOL PP	210,000,000	Kantor SATPOL PP			133,300,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	279,905,000.00	

23	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Kantor SATPOL PP	Jumlah dokumen	5 dokumen	100,000,000	Kantor SATPOL PP			176,700,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah dokumen	5 dokumen	162,637,000.00	(14,063,000)		5 dokumen	162,637,000
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir	Kantor SATPOL PP	Jumlah dokumen	2 dokumen	50,000,000	Kantor SATPOL PP			50,000,000	Kantor SATPOL PP	Jumlah dokumen	2 dokumen	50,000,000.00			2 dokumen	50,000,000
25	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kantor SATPOL PP				Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	240 O/b	195,773,400	Kantor SATPOL PP	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	240 O/b	195,773,400.00				240 O/b	195,773,400

26	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kantor SATPOL PP				Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	86 O/b	61,451,200	Kantor SATPOL PP	Jumlah penerima pengelolaan keuangan daerah	86 O/b	61,451,200.00			86 O/b	61,451,200
Program Peningkatan Keamanan dan Kenayamanan Lingkungan			Tingkat penyelesai an pelanggara n K3 (ketertiban, ketentrama n, keindahan) di Kabupaten	80%; 775 Pelangga ran	400,000,000	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	80%; 775 Pelangga ran	673,041,300		Tingkat penyelesaia n pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman , keindahan) di Kabupaten	80%; 775 Pelangga ran	748,604,400.00	-	75,563,100	80%; 775 Pelangga ran	748,604,400
27	Kerjasama penyelenggar aan pemeliharaa an dan penegakan ketentraman, Keindahan dan ketertiban	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	23 dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	23 dokumen	77,861,100	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	23 dokumen	77,861,100.00			23 dokumen	77,861,100

28	Fasilitasi Pengamanan Tempat dan Acara Penting Daerah	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	21; 14; 7 pengamanan; hari besar; kegiatan khusus di kabupaten	150,000,000	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	21; 14; 7 pengamanan; hari besar; kegiatan khusus di kabupaten	268,727,200	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Kerjasama, 18 Kecamatan	21; 14; 7 pengamanan; hari besar; kegiatan khusus di kabupaten	313,727,200.00		45,000,000	21; 14; 7 pengamanan; hari besar; kegiatan khusus di kabupaten	313,727,200
29	patroli dan deteksi dini gangguan Trantibum	Kab. KUKAR	Jumlah Patroli	400 Kali dalam Setahun	200,000,000	Kab. KUKAR	Jumlah P	400 Kali dalam Setahun	326,453,000	Kab. KUKAR	Jumlah P	440 Kali dalam Setahun	357,016,100.00		30,563,100	440 Kali dalam Setahun	357,016,100
																	-
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur SATPOL PP				21.87%	-				2,403,046,300				0.00	(2,403,046,300)	-		-
30	Penyiapan Tenaga Pengendalian keamanan dan Kenyamanan Lingkungan untuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas)	Kab. KUKAR	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	50 orang			Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	50 orang	2,403,046,300	Kab. KUKAR	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	0	0	-2,403,046,300			

31	Penigkatan Kemampuan anggota KORSIK (Korps Musik) SATPOL PP	Kab. KUKAR	Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	50 orang	500,000,000		Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	43 orang	317,988,440		Jumlah Orang yang Terdidik dan Terlatih	43 orang	307,988,440.00	-10,000,000		43 orang	307,988,440
32	Analisis kebutuhan Diklat Satpol PP, Linmas dan Banpol PP	Kab. KUKAR	Jumlah analisis	1 dokumen	132,641,380		Jumlah analisis	1 dokumen	130,291,380		Jumlah analisis	1 dokumen	130,291,380.00			1 dokumen	130,291,380
Program Pembinaan dan penegakan Produk Hukum Daerah			Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	60%	568,591,000		Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	40%; 500 Penegakan Produk Hukum	529,161,500		Cakupan penegakan produk Hukum Daerah	40%; 500 Penegakan Produk Hukum	484,648,400.00	(44,513,100)	-	40%; 500 Penegakan Produk Hukum	484,648,400
33	Pendataan & pemetaan wilayah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kab. KUKAR	Jumlah Pen	2 dokumen	55,000,000	Kab. KUKAR	Jumlah Per	2 dokumen	53,045,000		Jumlah Pengawasan	2 dokumen	53,045,000.00			2 dokumen	53,045,000

34	Pengawasan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kab. KUKAR	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada	500 laporan kejadian dan pelanggaran	130,000,000	Kab. KUKAR	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada	500 laporan kejadian dan pelanggaran	128,575,000		Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Perda dan Perkada	500 laporan kejadian dan pelanggaran	128,575,000.00			500 laporan kejadian dan pelanggaran	128,575,000
35	Pembinaan dan Penindakan Preventif non yustisial	Kab. KUKAR		2 Perda	110,000,000	Kab. KUKAR		2 Perda	108,131,600		-	2 Perda	108,131,600.00			2 Perda	108,131,600
36	Pelaksanaan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan	Kab. KUKAR	Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	3 perda	173,591,000	Kab. KUKAR	Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	3 perda	152,246,200	Kab. KUKAR	Jumlah Perda, Jumlah Pelanggar (Orang, Badan Hukum)	3 perda	138,296,200.00	-13,950,000		3 perda	138,296,200

37	Fasilitasi dan Koordinasi PPNS Kutai Kartanegara	Satpol PP Disnaker, BKPSDM, Bapenda, BLK, Dishub, Diskominfo	Jumlah dokumen	1; 6 dokumen ; pelaporan	100,000,000	Satpol PP Disnaker, BKPSDM, Bapenda, BLK, Dishub, Diskominfo	Jumlah dokumen	1; 6 dokumen ; pelaporan	87,163,700	Satpol PP Disnaker, BKPSDM, Bapenda, BLK, Dishub, Diskominfo	Jumlah dokumen	1; 6 dokumen ; pelaporan	56,600,600.00	-30,563,100		1; 6 dokumen ; pelaporan	56,600,600
																	-
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	30%	-		Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	30%	3,693,552,000		Cakupan pemberdayaan masyarakat Di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	30%	3,693,552,000.00	-	-		3,693,552,000
38	Pembentukan Kelompok Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini.	Kab. KUKAR	Jumlah regu	84; 840 regu; orang		Kab. KUKAR	Jumlah regu	84; 840 regu; orang	242,000,000		Jumlah regu	84; 840 regu; orang	242,000,000.00			84; 840 regu; orang	242,000,000

39	Pengaman Pemilu	Kab. KUKAR	Jumlah Satlinmas	2806 orang		Kab. KUKAR	Jumlah Sa	2806 orang	3,451,552,000		Jumlah Sat	2806 orang	3,451,552,000.00			2806 orang	3,451,552,000
					8,847,439,620				17,487,361,197				16,586,862,946.96	(2,618,032,400)	1,717,534,150		
														RASIONALISASI	(900,498,250)		

BAB IV

PENUTUP



Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA Perubahan) disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Produk hukum daerah, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA Perubahan) ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2016 - 2021.

Meskipun Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA Perubahan) ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA Perubahan) ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja PerubahanPerubahan (RENJA Perubahan) ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi Kabupaten Kutai Kartanegara **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”** dapat tercapai.

Tenggarong, 27Juli2020
Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Satuan



H. Fida Hurasani S.Sos
19731101 200012 1 003